

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TOLOK SATU KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA

TENDEAN ELYSA DESYRA

SALMIN DENGO

VERY Y LONDA

Abstract

This study aims to determine the implementation of the self-help housing stimulant program in the provision of livable houses in Tolok Satu Village, Tompaso District, Minahasa Regency.

This study uses a descriptive qualitative approach by describing the data obtained from the results of research on the implementation of self-help housing stimulant assistance programs in the provision of livable houses. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data was collected by means of observation, interviews, documentation, and data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this study consists of six aspects: policy standards and objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, social, political and economic conditions as well as the disposition of the implementor.

The results of this study indicate that the implementation of the self-help housing stimulant program in providing decent housing in Tolok Satu Village, Tompaso District, Minahasa Regency has not run optimally. Viewed from the aspect of the standard target recipients, the program has not gone well, the recruitment of beneficiaries has not been realized entirely because of the unpreparedness of the community to receive this assistance. The two sources of funds from this program were not sufficient, the three problems of socialization carried out by TFL as field facilitators only carried out socialization at the beginning of the introduction of the program and did not re-socialize it to the recipient community so that people did not understand the mechanism of this BSPS program, the four dispositions or attitudes TFL implementors, field facilitators, do not yet have firmness in providing understanding to the recipient community about the BSPS program, it must be carried out in predetermined groups, but the reality on the ground is that the community only builds their own houses.

Keywords: Implementation, Assistance Program, BSPS, Decent Homes

PENDAHULUAN

Setiap pembangunan yang dilakukan suatu negara pasti bertujuan untuk meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, segala upaya akan dilaksanakan pemerintah untuk menjadikan negaranya semakin maju. Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Pembangunan merupakan upaya pemerintah merubah dan mengerahkan masyarakat melalui berbagai cara yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur melalui berkurangnya angka kemiskinan di suatu daerah. Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya Ritonga (2003). Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan salah satunya dengan cara memberikan tempat tinggal yang layak bagi

kehidupan mereka. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, dan cerminan harkat dan martabat penghuninya, dengan memiliki rumah, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Menurut Musthofa (2008) rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Namun kenyataannya masih banyak rumah yang tidak layak huni yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat dan aman dan harmonis diseluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan, yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pemberian bantuan dari pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Melalui bantuan stimulan dari pemerintah, diharapkan masyarakat secara bersama-sama bisa turut membantu memperbaiki rumah warga miskin, baik dalam bentuk material bangunan, dana, tenaga dan lain sebagainya, dengan kata lain pembangunan rumah

swadaya juga turut membangun budaya gotong royong di masyarakat agar kembali kuat. Tujuan dibuatnya program BSPS adalah untuk memberdayakan MBR masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Desa Tolok Satu merupakan salah satu desa di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa yang mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 35 kepala keluarga penerima bantuan pada tahun 2018. Bantuan dana dari program ini yaitu Rp 15.000.000 yang terdiri dari Rp. 12.500.000 bahan material, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 untuk upah kerja. Pelaksanaan program ini di tangangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa. Adanya program ini masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah MBR mendapat bantuan untuk perbaikan kondisi rumah, sehingga program bantuan stimulan perumahan swadaya membawa dampak perubahan kondisi fisik rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat.

Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Tolok Satu Kecamatan Tomaso ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan antara lain rekrutmen calon penerima program BSPS belum terlaksana dengan optimal dimana sasaran penerima bantuan hanya terelisasi 22 kepala keluarga sedangkan jumlah target sasaran dari program ini ada 35 kepala keluarga, menjadi kendala calon penerima bantuan tidak mempunyai dana tambahan untuk membangun rumah sehingga mereka mundur dari calon penerima bantuan program BSPS ini, begitu juga bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan masi saja mengeluh dengan dana tambahan yang harus mereka siapkan untuk biaya tukang dan lainnya, masyarakat menggap

bantuan dana program ini masi belum cukup memadai. Kedua masalah sosialisasi TFL selaku tenaga fasilitator lapangan hanya melakukan sosialisasi di awal pengenalan program dan tidak mensosialisasikan kembali kepada masyarakat sehingga penerima bantuan tidak paham mengenai mekanisme program BSPS ini. Ketiga menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS dimana implementor TFL tenaga fasilitator lapangan belum memiliki ketegasan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima bantuan tentang program BSPS ini harus dilakukan secara berkelompok yang telah di tentukan, tapi kenyataan di lapangan masyarakat hanya melakukan pembangunan rumah mereka secara sendiri-sendiri.

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa”

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Menurut Nurdin Usman (2002:70) implemntasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Guntur Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Riplay dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang di maksudkan untuk membuat program berjalan. Sementara itu menurut Grindle dalam Winarno (2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengetakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Dunn (2003:109) menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi

kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Van meter dan Horn dalam Winarno, (2008:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-saran di tetapkan atau di identifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2018:88) mengatakan makna hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengatministrasikan dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Mazmanian dan Sabatier lebih lanjut mengatakan bahwa definisi ini menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat yang akhirnya berdampak pada yang diharapkan (intended)

maupun yang tidak diharapkan dari suatu program. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh model implementasi yang menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya di harapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kualitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan.

Konsep Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan stimulan perumahan swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni,

sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamantkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman dan nyaman. Rumah swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun diatas prakarsa dan upaya masyarakat, yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru baik di perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Yosua Mandolang, Florenc Daicy lengkong, Salmin Dengo. Ilmu Administrasi Negara 2018, dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Keluarga Penerima Manfaat akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya Programnya, belum bisa berjalan dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan model implementasi George c. Edward III, implementasi dari pandangan kebijakan dari 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Komunikasi itu penting faktor dalam keberhasilan suatu kebijakan, termasuk komando dan pengambilan keputusan. Sumber daya yang

memadai juga sumber daya manusia atau sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan, disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh penerapan kebijakan etika dan komitmen pembuatannya. Struktur birokrasi, yaitu sejauh mana rentang kendali antara kepemimpinan dan bawahan dalam melaksanakan struktur organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif. Hasil dari Penelitian ini secara umum menjelaskan tentang implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Ranoyapo belum berjalan maksimal.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Meyer Imanuel, Florence Daicy Lengkong, Alden Laloma. Ilmu Administrasi Negara 2018, dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan diterapkannya kebijakan stimulasi bantuan perumahan swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Perumahan Swadaya Stimulan di Kabupaten Minahasa Selatan belum cukup baik dilihat dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan yaitu: Pertama ukuran dan tujuan kebijakan, kedua sumber daya, ketiga karakteristik atau sifat, keempat komunikasi antar organisasi, kelima sikap pelaksana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikatakan Burhan Bungin (2008:68) dalam

penelitian ini bahwa metode deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada pada masyarakat yang menjadi objek penelitian, pada pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan hubungan fenomena-fenomena penelitian yang diamati dengan logika ilmiah.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Desa Tolok Satu Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Menggunakan model Implementasi dari Van meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) membagi ada enam variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Hubungan Antar Organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi
6. Disposisi Implementor

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, terdiri dari jawaban hasil pengisian kuesioner dan hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen dan laporan yang terkait dengan dipenelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiono (2016:224) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

2. Wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pernyataan-pernyataan tertulis dan alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompasso.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini merupakan suatu upaya untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni.

Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Carl Van Horn. Van Meter dan Van Horn mengatakan proses implementasi merupakan performa dari sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel meliputi: Standart dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Lingkungan Sosial, politik dan Ekonomi, Disposisi implementor/Sikap Pelaksana. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari model implementasi ini:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) menjelaskan standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya

merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Dilihat dari standar dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Bantuan stimulan perumahan swadaya telah mengikuti pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/SE/Dr/2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Standart dan sasaran penerima bantuan telah berhasil diberikan kepada MBR masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah yang layak huni. Berdasarkan dari hasil wawancara diatas Bapak M.O Kepala Desa Tolok Satu mengatakan Untuk penerima bantuan di Desa Tolok Satu ada 35 kepala keluarga tapi sebagian tidak bersedia menerima bantuan ini dikarenakan tidak adanya biaya tambahan yang diperlukan untuk proses pembangunan rumah. sehingga mereka akhirnya mundur dari calon penerima bantuan program BSPS. Jadi disimpulkan bahwa target sasaran penerima bantuan program BSPS belum optimal dimana target sasaran penerima program seharusnya ada 35 kepala keluarga tapi hanya terealisasi sebanyak 22 kepala keluarga karna ketidak siapan masyarakat menerima program ini.

2. Sumber Daya.

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) menjelaskan Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia SDM merupakan sumber daya yang penting

dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Tolok Satu yaitu TFL tenaga fasilitator lapangan, pemerintah desa dan masyarakat/kelompok penerima bantuan yang disingkat KPB. Dilihat dari sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai dalam pelaksanaan program ada satu tenaga fasilitator lapangan yang bertugas dan di dampingi oleh pemerintah desa dalam menagani program ini dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai tahap pelaporan sehingga mendukung pelaksanaan program BSPS di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso.

b. Sumber Dana

Selain sumber daya manusia juga dibutuhkan sumber daya yang lain, seperti sumber dana yang mendorong memperlancar implementasi program. Sumber dana program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana besaran bantuan dana BSPS sebanyak Rp. 15.000.000 juta terbagi dalam Rp.12.500.000 bahan material bangunan dan uang tunai Rp. 2.500.000 untuk upah kerja. Pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Minahasa di tangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Dari segi sumber dana program ini sudah sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni. Tapi permasalahan sumber dana dari program ini masi kurang memadai karna sumber bantuan BSPS ini hanya sebagai dana stimulan harus ada dana tambahan atau swadaya dari masyarakat. Masyarakat sering mengeluh dengan dana yang diberikan

belum cukup memadai karna mereka masi sulit mendapatkan dana tambahan untuk membangun rumah mereka.

3. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan cukup baik, ada komonikasi antara pihak dinas, TFL tenaga fasilitator lapangan, pemerintah desa dan masyarakat tentang program BSPS ini. Pihak dinas dan tenaga fasilitator lapangan telah melakukan sosialisasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program BSPS. Namun pelaksanaan program BSPS sosioalisasi dilakukan hanya pada saat pertemuan awal dan tidak dilakukan di tingkat kelompok penerima bantuan yang mengakibatkan penerima bantuan melakukan pembangunan secara sendiri-sendiri sehingga komonikasi antara TFL dan kelompok penerima bantuan belum berjalan dengan baik.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah yang mencakup pada struktur organisasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi di dalam suatu program. Dilihat dari karakteristik egen pelaksana menurut hasil penelitian yang dilakukan telah didukung oleh struktur organisasi yang dalam pelaksanaan BSPS mengikuti aturan yang ada, dengan adanya struktur organisasi, dimana yang menangani pelaksanaan program BSPS di Desa Tolok Kecamatan Tompaso adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Minahasa yang hubungan baik antar implementor program BSPS yang ada di lapangan yaitu tim teknis kabupaten, Fasilitator lapangan, dari karakteristik agen pelaksana dapat dikatakan sudah adil dan jujur dalam menjalankan

program BSPS sehingga tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari masyarakat.

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan yang memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya.

Dilihat dari segi kondisi lingkungan sosial, dan politik di desa masyarakat dan pemerintah desa sangat mendukung dan setuju adanya program bantuan ini karna bisa membantu masyarakat miskin untuk memiliki rumah yang layak di huni. Dari Segi ekonomi masyarakat setelah adanya program BSPS tidak ada pengaruh peningkatan ekonomi atau penghasilan mereka, karna penerima program BSPS ini adalah MBR masyarakat berpenghasilan rendah yang pekerjaan mereka hanya sebagai petani jadi tidak ada pengaruh peningkatan ekonomi masyarakat, namun dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, politik dan ekonomi memengaruhi pencapaian pelaksanaan program.

6. Disposisi Implementor

Dalam disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni respons implementor terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan. Respon pelaksana atau sikap implementor berpengaruh langsung terhadap kinerja pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Tolok Satu Kecamatan Tomposo. Implementor dalam

pelaksanaanya, dapat dikatakan memberikan respon yang positif dengan adanya program ini dapat di lihat dari komitmen dan dukungan dari implementor yang ada di desa. Pemahaman implementor tentang bantuan stimulan perumahan swadaya suda baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program ini dapat dilihat dengan implementor memberikan sosialisasi pada awal pengenalan program dan juga mendampingi masyarakat dalam tahap persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. Namun menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS dimana implementor TFL tenaga fasilitator lapangan belum memiliki ketegasan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program BSPS yang harus dilakukan secara berkelompok tapi membiarkan penerima bantuan bekerja secara individual mengerjakan pembangunan rumah mereka sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Standart dan Sasaran Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa mengikuti pedoman Peraturan Menteri PUPR No.07/SE/Dr/2018 dimana sasaran yang menerima bantuan BSPS sudah sesuai dengan kriteria yang ada yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam pelaksanaan program masih belum optimal dimana perekrutan penerima bantuan tidak terealisasi semuanya karena ketidak siapan masyarakat menerima bantuan ini.
2. Sumberdaya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya yaitu dari pihak Dinas, fasilitator lapangan, dan pemerintah Desa. Sedangkan sumber dana dari program ini dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun sumber dana dari program ini masi di anggap belum cukup memadai, masyarakat masih mengeluh dengan dana yang diberikan belum cukup memadai karna mesasyarakat penerima bantuan masih sulit mendapatkan dana tambahan untuk membangun rumah mereka.

3. Hubungan antar Organisasi dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya belum berjalan dengan cukup baik antara TFL tenaga fasilitator lapangan dan masyarakat penerima bantuan program BPS. Tenaga fasilitator hanya mensosialisasikan program ini pada saat pertemuan awal pengenalan program dan tidak melakukan kebal sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat penerima bantuan BPS melakukan secara sendiri-sendiri pembangunan rumah mereka.
4. Karakteristik Agen Pelaksana dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya mencakup pada struktur organisasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi antara pihak Dinas PERKIM Kabupaten minahasa, Tim teknis kabupaten, Fasilitator lapangan dapat berlaku adil, dan jujur dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya sehingga tidak menimbulkan persepsi yang negatif bagi masyarakat.
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja implementasi pada program bantuan stimulan perumahan swadaya, di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso dimana kondisi sosial dan politik mempengaruhi pelaksanaan

program adanya dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam mendukung jalannya program BPS ini.

6. Disposisi Implementor Ini menunjuk bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan. Respon pelaksana atau sikap implementor dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso, Tenaga fasilitator lapangan dapat dikatakan memberikan respon yang positif dengan adanya program ini. Namun menjadi kendala dalam pelaksanaan program BPS dimana implementor TFL tenaga fasilitator lapangan belum memiliki ketegasan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang petunjuk teknis pelaksanaan program BPS.

SARAN

Beraskan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Penyediaan Rumah LayakHuni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa dapat meninjau kembali syarat dan ketentuan dari calon penerima bantuan terkait siapa yang berhak dan siap mendapatkan bantuan program ini yaitu siap berswadaya baik dana dan tenaga.
2. Harus ada peningkatan anggaran bantuan setiap tahunnya, mengingat dana yang di berikan kepada masyarakat masih belum cukup memadai.
3. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi oleh tenaga Fasilitator Lapangan kepada

masyarakat tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar masyarakat penerima bantuan lebih paham akan pentingnya swadaya dan kerjasama dari masyarakat.

4. Diharapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) seharusnya dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. TFL harus bisa mengarahkan kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan program secara tegas. Agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tanpa adanya kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, L. 2006. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dunn, N. W. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Suharto, E. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustohofa, B. 2008. *Kamus kependudukan*. Yogyakarta: Panji Pustaka
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ritonga, H. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: badan Pusat Statistik
- Setiawan, G. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, N. H. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: LukmanOffset.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahab, A. S. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- _____, 2016. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Widodo, J. 2018. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative

Sumber Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/18 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- <http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/presentase-penduduk-miskin-maret-2018>